



Transformasi Arsitektur Keuangan Global oleh BRICS dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Suci Hati Amr¹, Zella Rahmadani²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

email : sucihatiamri@gmail.com ; ramadhanizella15@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menganalisis peran BRICS dalam transformasi arsitektur keuangan global menuju sistem yang lebih multipolar serta menilai relevansinya dalam perspektif ekonomi dan keuangan syariah. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui telaah literatur integratif terhadap artikel ilmiah, laporan lembaga internasional, dokumen resmi BRICS, publikasi New Development Bank, serta literatur ekonomi syariah yang membahas stabilitas, keadilan, dan keterkaitan sektor keuangan dengan sektor riil. Hasil kajian menunjukkan bahwa BRICS tidak secara revolusioner menggantikan sistem moneter internasional yang ada, melainkan membangun tekanan reformis melalui tiga jalur utama: perluasan penggunaan mata uang lokal, penguatan institusi pembiayaan pembangunan alternatif seperti New Development Bank dan Contingent Reserve Arrangement, serta pengembangan infrastruktur pembayaran lintas negara yang lebih interoperabel. Namun, agenda tersebut masih menghadapi hambatan besar, seperti heterogenitas kepentingan antaranggota, keterbatasan likuiditas mata uang non-dolar, kedalaman pasar keuangan yang belum sebanding dengan dolar Amerika Serikat, serta belum mapannya tata kelola sistem pembayaran bersama. Dari perspektif syariah, transformasi BRICS memiliki titik temu dengan prinsip keadilan, stabilitas, transparansi, pembagian risiko, dan pembiayaan berbasis aset riil. Meski demikian, relevansi syariah tidak dapat berhenti pada kesamaan normatif; ia memerlukan pelembagaan melalui standar tata kelola syariah, instrumen sukuk pembangunan, mitigasi risiko mata uang, dan kerangka pembiayaan yang sesuai dengan maqashid syariah. Artikel ini berkontribusi dengan menawarkan kerangka konseptual yang menempatkan BRICS sebagai momentum reformasi keuangan global sekaligus peluang strategis bagi penguatan ekonomi syariah dalam tata kelola keuangan internasional..

Kata kunci: BRICS, dedolarisasi, keuangan global, multipolaritas, ekonomi syariah

Abstract

This article analyzes the role of BRICS in transforming the global financial architecture toward a more multipolar system and examines its relevance from the perspective of Islamic economics and finance. The study applies a qualitative approach through an integrative literature review of academic articles, reports from

1 Transformasi Arsitektur Keuangan Global oleh BRICS dalam Perspektif Ekonomi Syariah

international institutions, official BRICS documents, New Development Bank publications, and Islamic finance literature on stability, justice, and the linkage between finance and the real economy. The findings indicate that BRICS is not replacing the existing international monetary system in a revolutionary manner; rather, it exerts reformist pressure through three main channels: the wider use of local currencies, the strengthening of alternative development-finance institutions such as the New Development Bank and the Contingent Reserve Arrangement, and the development of more interoperable cross-border payment infrastructures. Nevertheless, this agenda faces significant constraints, including divergent interests among members, limited liquidity of non-dollar currencies, financial markets that remain less deep than those supporting the US dollar, and the still-developing governance of common payment systems. From an Islamic finance perspective, the BRICS transformation resonates with the principles of justice, stability, transparency, risk sharing, and asset-based financing. However, the Islamic relevance of this transformation cannot remain merely normative; it requires institutionalisation through sharia governance standards, development sukuk, currency-risk mitigation, and financing frameworks aligned with maqasid al-shariah. This article contributes a conceptual framework that positions BRICS as both a momentum for global financial reform and a strategic opportunity for strengthening Islamic economics within international financial governance..

Keywords: BRICS, dedollarization, global finance, multipolarity, Islamic economics

Pendahuluan

Transformasi arsitektur keuangan global dalam dua dekade terakhir menunjukkan perubahan yang semakin kuat dari struktur keuangan internasional yang didominasi Amerika Serikat dan lembaga Bretton Woods menuju susunan yang lebih plural. Perubahan tersebut dipicu oleh meningkatnya bobot ekonomi negara-negara emerging markets, fragmentasi geopolitik, akselerasi digitalisasi pembayaran, serta meningkatnya kritik terhadap ketergantungan sistem moneter internasional pada dolar Amerika Serikat. Dalam konteks ini, BRICS muncul sebagai salah satu koalisi paling menonjol yang mendorong agenda reformasi tata kelola keuangan global (Gallagher & Kozul-Wright, 2022; Stuenkel, 2022).

BRICS pada awalnya terdiri atas Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Setelah ekspansi 2024, kelompok ini memasukkan Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Indonesia kemudian diumumkan sebagai anggota penuh pada Januari 2025. Perluasan tersebut memperlihatkan bahwa BRICS bukan lagi sekadar forum ekonomi lima negara besar, melainkan platform Global South yang berupaya memperluas representasi negara berkembang dalam tata kelola ekonomi internasional. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa status beberapa negara undangan, termasuk Arab Saudi, harus dibaca secara hati-hati karena proses formalisasi keanggotaan tidak selalu berlangsung serentak dan final (BRICS, 2024, 2025; Brazil Ministry of Foreign Affairs, 2025).

Agenda utama BRICS dalam bidang keuangan meliputi peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan lintas negara, penguatan New Development Bank (NDB), pembentukan Contingent Reserve

Arrangement (CRA), serta pembahasan mengenai interoperabilitas sistem pembayaran antarnegara. Agenda ini sering dibaca sebagai bagian dari proses dedolarisasi. Namun, dedolarisasi dalam konteks BRICS tidak seharusnya dipahami sebagai penghapusan dolar secara total, melainkan sebagai upaya mengurangi risiko konsentrasi yang muncul ketika perdagangan, cadangan devisa, pembiayaan pembangunan, dan infrastruktur pembayaran global terlalu bergantung pada satu mata uang dominan (BRICS, 2024; New Development Bank, 2022).

Dominasi dolar tetap kuat karena ditopang oleh kedalaman pasar keuangan Amerika Serikat, likuiditas surat utang pemerintah AS, posisi dolar sebagai aset aman (safe haven), serta jaringan kelembagaan yang luas dalam perdagangan dan keuangan global. Literatur terbaru menunjukkan bahwa pangsa dolar dalam cadangan devisa internasional memang mengalami penurunan gradual, tetapi penurunan tersebut lebih banyak menunjukkan diversifikasi portofolio cadangan daripada peralihan cepat menuju satu mata uang pengganti. Dengan demikian, tantangan BRICS bukan hanya membangun narasi alternatif, melainkan menyediakan infrastruktur moneter, pasar keuangan, dan kredibilitas kebijakan yang dapat menandingi fungsi global dolar (Arslanalp et al., 2022; Chinn & Frankel, 2023; IMF, 2025).

Dalam perspektif ekonomi dan keuangan syariah, dinamika ini menjadi penting karena sistem keuangan Islam menawarkan fondasi etik dan institusional yang menekankan keadilan, larangan riba, penghindaran gharar dan maysir, pembagian risiko, serta keterkaitan transaksi dengan aset dan aktivitas ekonomi riil. Nilai-nilai tersebut memiliki resonansi dengan agenda multipolaritas keuangan yang berusaha mengurangi ketergantungan, memperluas ruang kebijakan, dan menata ulang relasi antara pembiayaan global dan pembangunan. Meski demikian, keselarasan normatif tidak otomatis berarti integrasi syariah akan terjadi. Integrasi tersebut memerlukan desain kelembagaan, standar tata kelola, instrumen yang sesuai syariah, dan komitmen politik dari negara-negara anggota (Askari et al., 2012; Chapra, 2008; Iqbal & Mirakhor, 2011).

Sebagian besar kajian mengenai BRICS masih berpusat pada dedolarisasi, rivalitas geopolitik, reformasi Bretton Woods, dan strategi Tiongkok dalam internasionalisasi renminbi. Sementara itu, kajian yang secara khusus menghubungkan transformasi arsitektur keuangan global oleh BRICS dengan ekonomi dan keuangan syariah masih relatif terbatas. Kekosongan ini penting karena sebagian anggota dan mitra BRICS memiliki basis ekonomi Islam yang signifikan, termasuk Indonesia, Uni Emirat Arab, Iran, Mesir, serta negara-negara Teluk yang memiliki peran besar dalam pasar sukuk dan keuangan syariah global (IFSB, 2025; IIFM, 2025; LSEG & ICD, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana BRICS berkontribusi terhadap

transformasi arsitektur keuangan global; kedua, sejauh mana dinamika tersebut relevan bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Tujuan penelitian ini adalah memperkuat pemahaman konseptual mengenai BRICS sebagai aktor reformasi keuangan global sekaligus mengevaluasi peluang dan batas integrasi prinsip syariah dalam arsitektur keuangan multipolar.

Kajian Teori

A. Arsitektur Keuangan Global dan Sistem Moneter Internasional

Arsitektur keuangan global merujuk pada keseluruhan kerangka institusional, aturan, mekanisme, serta aktor yang mengatur aliran keuangan lintas negara dalam sistem ekonomi internasional. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, arsitektur keuangan global didominasi oleh sistem Bretton Woods yang menempatkan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama dunia serta memperkuat peran lembaga-lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Struktur ini menciptakan sistem moneter internasional yang terpusat, dengan ketergantungan tinggi negara-negara lain terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat (Farhi & Maggiori, 2022).

Namun, dalam perkembangannya, sistem ini menghadapi berbagai kritik, terutama terkait ketimpangan distribusi kekuatan ekonomi, bias kebijakan terhadap negara maju, serta dampak negatif spillover kebijakan moneter negara hegemon terhadap stabilitas ekonomi negara berkembang. Global Financial Crisis 2008 dan krisis akibat pandemi COVID-19 semakin menegaskan kerentanan arsitektur keuangan global yang terlalu bergantung pada satu pusat kekuatan moneter (Gallagher & Kozul-Wright, 2022). Kondisi ini mendorong munculnya tuntutan reformasi menuju sistem keuangan global yang lebih inklusif, seimbang, dan multipolar.

B. Konsep Multipolaritas dalam Keuangan Global

Multipolaritas dalam konteks keuangan global mengacu pada kondisi di mana kekuatan ekonomi dan moneter dunia tidak lagi terpusat pada satu negara atau satu mata uang dominan, melainkan tersebar pada beberapa pusat kekuatan ekonomi utama. Dalam sistem multipolar, negara-negara emerging markets memiliki peran yang lebih signifikan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global, arsitektur moneter, serta mekanisme stabilisasi keuangan internasional (Subacchi, 2020).

Kemunculan multipolaritas keuangan ditandai oleh meningkatnya kontribusi negara-negara non-Barat terhadap pertumbuhan ekonomi global, diversifikasi mata uang cadangan, serta pembentukan lembaga keuangan alternatif di luar kerangka Bretton Woods. Menurut IMF (2023), pergeseran ini merupakan refleksi dari perubahan struktur ekonomi dunia, di mana pusat pertumbuhan global semakin bergeser ke Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Multipolaritas dipandang mampu mengurangi risiko sistemik akibat dominasi

satu mata uang global, serta memberikan ruang bagi negara berkembang untuk memiliki otonomi ekonomi yang lebih besar.

C. BRICS sebagai Aktor Baru dalam Arsitektur Keuangan Global

BRICS merupakan kelompok negara emerging markets yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, yang dibentuk sebagai respons terhadap keterbatasan representasi negara berkembang dalam tata kelola ekonomi global. Seiring waktu, BRICS berkembang menjadi koalisi ekonomi dan geopolitik yang memiliki pengaruh signifikan dalam sistem keuangan internasional, terutama setelah ekspansi keanggotaan BRICS.

Peran BRICS dalam arsitektur keuangan global tercermin melalui beberapa inisiatif strategis, seperti pembentukan New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA). Kedua lembaga ini dirancang sebagai alternatif terhadap IMF dan Bank Dunia, dengan pendekatan pembiayaan yang lebih fleksibel, berorientasi pembangunan, dan minim intervensi kebijakan domestik negara peminjam (Stuenkel, 2022). Keberadaan BRICS menunjukkan upaya nyata untuk menciptakan tatanan keuangan global yang lebih demokratis dan merepresentasikan kepentingan negara berkembang.

D. Dedolarisasi dan Penggunaan Mata Uang Lokal

Dedolarisasi merupakan strategi sistemik yang bertujuan mengurangi ketergantungan global terhadap dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan internasional, cadangan devisa, dan sistem pembayaran lintas negara. Dalam konteks BRICS, dedolarisasi bukan hanya respons ekonomi, tetapi juga langkah strategis untuk mengurangi kerentanan terhadap tekanan geopolitik dan sanksi finansial (Chinn & Frankel, 2023).

Upaya dedolarisasi BRICS dilakukan melalui peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral, perjanjian swap mata uang, diversifikasi cadangan devisa, serta pengembangan sistem pembayaran alternatif. Menurut laporan BIS (2023), tren penurunan dominasi dolar dalam cadangan devisa global menunjukkan perubahan gradual namun signifikan dalam sistem moneter internasional. Dedolarisasi dipandang sebagai fondasi penting bagi terbentuknya sistem keuangan global yang lebih stabil dan berimbang.

E. Lembaga Keuangan Alternatif: NDB dan CRA

New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA) merupakan dua pilar utama dalam arsitektur keuangan alternatif yang dibangun oleh BRICS. NDB berfokus pada pembiayaan proyek pembangunan dan infrastruktur, khususnya di negara berkembang, dengan prinsip kesetaraan tata kelola dan fleksibilitas pembiayaan. Berbeda dengan lembaga Bretton Woods, NDB tidak mensyaratkan reformasi struktural neoliberal yang seringkali membebani negara peminjam (NDB, 2023).

Sementara itu, CRA berfungsi sebagai mekanisme penyangga likuiditas untuk membantu negara anggota menghadapi krisis neraca pembayaran atau tekanan nilai tukar. CRA mencerminkan upaya BRICS dalam menciptakan sistem stabilisasi keuangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan negara berkembang. Keberadaan kedua institusi ini memperkuat posisi BRICS sebagai aktor utama dalam transformasi arsitektur keuangan global menuju sistem multipolar.

F. Perspektif Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Arsitektur Keuangan Global

Ekonomi dan keuangan syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, transparansi, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks global, keuangan syariah menawarkan pendekatan alternatif yang menekankan stabilitas sistemik, pembiayaan berbasis aset riil, serta distribusi risiko yang lebih adil (Ismal, 2022).

Transformasi arsitektur keuangan global menuju sistem multipolar membuka ruang yang lebih luas bagi integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Diversifikasi mata uang, penguatan pembiayaan berbasis pembangunan, serta pengurangan dominasi sistem keuangan berbasis utang sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah. Dengan demikian, inisiatif BRICS dalam membangun sistem keuangan alternatif berpotensi menjadi katalis bagi pengembangan keuangan syariah di tingkat global, baik melalui instrumen sukuk internasional, pembiayaan infrastruktur syariah, maupun kerja sama moneter yang lebih berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur (*literature-based research*). Pendekatan ini dipilih karena topik mengenai transformasi arsitektur keuangan global dan peran BRICS merupakan isu yang bersifat konseptual, strategis, dan multidisipliner. Oleh karena itu, analisis lebih tepat dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasikan berbagai sumber ilmiah yang relevan dibandingkan menggunakan metode kuantitatif atau pengolahan data statistik. Proses penelitian dimulai dengan mengumpulkan berbagai literatur utama yang membahas dinamika sistem keuangan internasional, multipolaritas global, dedolarisasi, integrasi BRICS, serta konsep-konsep dalam ekonomi dan keuangan syariah. Literatur yang digunakan berasal dari jurnal akademik, laporan lembaga internasional, dokumen resmi BRICS, serta buku dan publikasi ilmiah yang relevan. Seluruh sumber dipilih berdasarkan keterkinian, relevansi topik, serta kontribusinya terhadap pemahaman mengenai perubahan arsitektur keuangan global.

Setelah proses pengumpulan literatur, tahap berikutnya adalah melakukan analisis tematik. Pada tahap ini, informasi yang diperoleh

dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, seperti: (1) perkembangan struktur keuangan global dan perubahan pusat kekuatan ekonomi, (2) inisiatif BRICS dalam membentuk arsitektur keuangan alternatif, (3) arah dedolarisasi dan penggunaan mata uang lokal, serta (4) relevansi nilai-nilai ekonomi syariah dalam dinamika tersebut. Pengelompokan tema ini membantu memetakan hubungan antar fenomena dan membangun kerangka argumentatif artikel secara sistematis. Tahap berikutnya adalah melakukan interpretasi dan sintesis terhadap isi literatur. Proses ini dilakukan dengan membandingkan pandangan berbagai sumber, mengidentifikasi pola, mengenali argumentasi yang kuat, serta menilai konsistensi logis dari setiap informasi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan analisis komprehensif mengenai posisi BRICS dalam perubahan arsitektur keuangan global dan memadukannya dengan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah.

Metodologi ini menekankan proses analisis yang bersifat reflektif dan komparatif, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bukan berasal dari data empiris yang diolah secara statistik, melainkan dari interpretasi ilmiah terhadap literatur yang kredibel. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menggambarkan dinamika global secara mendalam dan menawarkan perspektif kritis yang relevan dengan isu-isu kontemporer dalam ekonomi internasional dan keuangan syariah.

Hasil dan Pembahasan

A. Transformasi Arsitektur Keuangan Global dalam Konteks Multipolaritas

Arsitektur keuangan global sejak berakhirnya Perang Dunia II dibangun di atas struktur yang sangat terpusat, yaitu dominasi dolar sebagai mata uang cadangan global dan peran utama lembaga Bretton Woods (IMF dan Bank Dunia). Namun, dalam dua dekade terakhir, konfigurasi kekuatan ekonomi dunia mengalami perubahan struktural yang semakin sulit untuk diabaikan. Pergeseran tersebut dimotori oleh peningkatan kontribusi negara-negara emerging markets, terutama BRICS, yang kini menjadi kekuatan tandingan dari hegemoni ekonomi Barat.

Menurut IMF (2023), kontribusi BRICS terhadap pertumbuhan ekonomi global meningkat secara konsisten dan melampaui G7. Sementara G7 mengalami stagnasi akibat perlambatan demografis dan penurunan produktivitas, BRICS menunjukkan ketahanan ekonomi yang lebih tinggi terhadap krisis global, terutama selama pandemi COVID-19. Peningkatan kontribusi tersebut memberikan landasan kuat bagi terbentuknya sistem keuangan global yang lebih multipolar.

Tren multipolaritas ini diperkuat oleh melemahnya pangsa dolar dalam cadangan devisa global. Meskipun dolar masih menjadi mata uang dominan, tren penurunannya semakin jelas. Laporan BIS (2023) menunjukkan penurunan kepemilikan dolar dari 71% menjadi 58% dalam 20 tahun terakhir. Sementara itu, yuan meningkat pesat terutama karena strategi internasionalisasi Tiongkok melalui Belt and Road Initiative.

Tabel 1. Kontribusi BRICS vs G7 terhadap Ekonomi Global (Persentase PDB Dunia)

Tahun	Kontribusi BRICS (%)	Kontribusi G7 (%)	Rasio BRICS/G7
2000	19%	44%	0.43
2010	26%	40%	0.65
2020	31%	34%	0.91
2023	32.5%	±29%	1.12

Sumber: IMF World Economic Outlook (2023)

Data tersebut menunjukkan bahwa dominasi ekonomi global telah bergeser dari Barat ke Timur dan Selatan. Pergeseran ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga pada seluruh arsitektur keuangan global, termasuk pola transaksi lintas negara, mekanisme penyangga likuiditas global, dan arah reformasi sistem moneter internasional.

B. Peran Strategis BRICS dalam Rekonstruksi Sistem Moneter Internasional

Transformasi arsitektur keuangan global tidak dapat dilepaskan dari peran strategis BRICS sebagai koalisi negara-negara yang menantang dominasi sistem moneter internasional berbasis Western-led institutions. BRICS kini berkembang menjadi pusat gravitasi baru dalam ekonomi global dan menjadi salah satu aktor paling berpengaruh dalam rekonstruksi sistem moneter internasional. Peran strategis ini dapat dipahami melalui beberapa dimensi utama: dedolarisasi, pembentukan lembaga keuangan alternatif, pengembangan infrastruktur pembayaran global, koordinasi kebijakan moneter lintas-negara, dan konsolidasi aliansi geopolitik-ekonomi.

1) Dedolarisasi sebagai Strategi Sistemik Mengurangi Ketergantungan Global terhadap Dolar

Dedolarisasi merupakan salah satu agenda paling konsisten dan strategis BRICS. Tujuan utamanya bukan sekadar mengurangi dominasi dolar dalam perdagangan, tetapi juga menyusun arsitektur moneter yang tidak bergantung pada kebijakan Amerika Serikat yang sering menimbulkan volatilitas global.

Beberapa faktor yang mendorong dedolarisasi BRICS antara lain:

a) Dampak spillover kebijakan moneter The Fed

Kenaikan suku bunga Federal Reserve sering memicu arus modal keluar dari negara berkembang, mendevaluasi mata uang mereka, dan meningkatkan biaya utang dalam dolar (Chinn & Frankel, 2023).

b) Weaponization of finance

Sanksi finansial AS terhadap Rusia memperlihatkan bagaimana dolar dapat digunakan sebagai instrumen geopolitik. Hal ini mendorong negara-negara BRICS untuk mencari alternatif yang lebih aman

(Stuenkel, 2022).

- c) Ketidakselarasan struktur moneter global
- d) Sistem moneter internasional saat ini dianggap bias terhadap kepentingan negara-negara maju dan tidak mencerminkan distribusi kekuatan ekonomi global yang sebenarnya (Gallagher & Kozul-Wright, 2022).

Dedolarisasi BRICS dilakukan melalui:

- a) transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal
- b) swap keuangan bilateral
- c) pembayaran lintas-negara melalui sistem alternatif
- d) diversifikasi cadangan devisa ke yuan, emas, dan mata uang BRICS lainnya

Menurut laporan resmi BRICS (2024), lebih dari 35% perdagangan intra-BRICS kini tidak lagi menggunakan dolar. Angka ini diperkirakan meningkat pasca ekspansi BRICS+ pada 2024 yang memasukkan Arab Saudi, UEA, Iran, Mesir, dan Ethiopia negara-negara strategis bagi perdagangan energi dan komoditas global. Hal ini menandai tahap baru dalam struktur moneter internasional, di mana dolar mulai kehilangan posisinya sebagai satu-satunya instrumen transaksi berskala global.

2) Pembentukan Lembaga Keuangan Alternatif: NDB dan CRA sebagai Pilar Sistem Baru

BRICS membangun infrastruktur keuangan sendiri sebagai tandingan IMF dan Bank Dunia melalui:

a) **New Development Bank (NDB)**

NDB dirancang untuk mendanai proyek pembangunan dan infrastruktur tanpa persyaratan reformasi struktural seperti yang diterapkan IMF atau Bank Dunia.

Hingga 2023:

1. NDB telah membiayai 96 proyek
2. total pendanaan mencapai **USD 33 miliar**
3. fokus pada energi hijau, digitalisasi, transportasi, dan infrastruktur sosial (NDB, 2023)
4. Keunggulan NDB adalah:
5. struktur tata kelola yang setara (tidak ada dominasi satu negara)
6. kesediaan menerbitkan pinjaman dalam mata uang lokal untuk mengurangi risiko nilai tukar
7. pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pembangunan, bukan pengetatan fiskal

Menurut Stuenkel (2022), keberadaan NDB menciptakan dinamika baru yang berpotensi mengurangi ketergantungan negara berkembang terhadap lembaga Bretton Woods.

b) **Contingent Reserve Arrangement (CRA)**

CRA menyediakan *safety net* keuangan bagi negara anggota bila mengalami krisis likuiditas atau tekanan nilai tukar.

Fungsi CRA mirip dengan IMF, tetapi tanpa syarat neoliberal atau pengetatan fiskal keras. CRA menjadi simbol konsolidasi moneter BRICS dalam menciptakan sistem stabilisasi likuiditas berbasis multipolar yang tidak rentan terhadap dominasi politik Barat.

C. Pengembangan Sistem Pembayaran Global Alternatif terhadap SWIFT

BRICS tidak hanya menantang arsitektur moneter, tetapi juga infrastruktur sistem pembayaran global. Ini dilakukan melalui dua kanal utama:

1) CIPS (China's Cross-Border Interbank Payment System)

CIPS menjadi alternatif SWIFT dengan karakteristik:

1. transaksi lebih cepat
2. biaya lebih rendah
3. tidak bergantung pada jaringan AS
4. Menurut BIS (2023), transaksi melalui CIPS meningkat 103% dalam empat tahun terakhir.

2) BRICS Pay dan rencana sistem pembayaran terpadu

BRICS mengembangkan BRICS Pay, platform pembayaran terpadu berbasis teknologi digital yang dapat digunakan oleh warga negara anggota. Proyek ini diperkirakan menjadi bagian penting dalam dedolarisasi karena mengurangi peran bank koresponden berbasis dolar. Prasad (2021) menegaskan bahwa digitalisasi keuangan akan menjadi faktor penentu transformasi sistem moneter global, dan BRICS berada di garis depan inisiatif ini.

D. Inisiatif Mata Uang Bersama BRICS

Salah satu isu yang paling banyak menarik perhatian adalah rencana penciptaan mata uang bersama BRICS. Meskipun masih dalam tahap kajian, mata uang bersama diproyeksikan sebagai:

- 1) instrumen penyimpan nilai
- 2) alat transaksi internasional
- 3) unit akun untuk perdagangan besar, seperti minyak dan komoditas strategis

Farhi & Maggiori (2022) menyatakan bahwa mata uang kolektif hanya dapat sukses jika didukung oleh pasar keuangan yang dalam, stabilitas makro, dan konsensus politik. Tantangan terbesar BRICS adalah perbedaan kebijakan moneter dan tingkat inflasi antar-anggotanya. Namun, upaya ini tetap menjadi langkah maju dalam rekonstruksi sistem moneter global.

E. BRICS sebagai Koalisi Geopolitik-Ekonomi yang Mengubah Arah Sistem Moneter Global

BRICS bukan sekadar platform ekonomi, tetapi entitas geopolitik baru yang berupaya menyeimbangkan hegemoni global. Dalam konteks konflik

geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan AS-Tiongkok, BRICS memperluas perannya sebagai:

- 1) forum diplomasi ekonomi
- 2) wadah koordinasi kebijakan moneter regional
- 3) mekanisme perlawanan terhadap dominasi dolar AS
- 4) pusat alternatif pembiayaan pembangunan
- 5) Ekspansi BRICS+ pada 2024 menunjukkan bahwa:
- 6) 80% negara berkembang menyambut baik sistem keuangan multipolar
- 7) negara produsen minyak tertarik pada perdagangan non-dolar
- 8) negara Islam melihat peluang integrasi syariah melalui BRICS

Dengan demikian, BRICS memainkan peran fundamental dalam membangun arsitektur moneter global yang lebih demokratis.

F. Dampak Dedolarisasi BRICS terhadap Stabilitas Keuangan Negara Berkembang

Upaya dedolarisasi yang diprakarsai oleh BRICS tidak hanya berdampak pada perubahan struktur sistem moneter internasional, tetapi juga membawa implikasi signifikan terhadap stabilitas keuangan negara-negara berkembang. Ketergantungan yang tinggi terhadap dolar AS selama ini menjadikan banyak negara emerging markets rentan terhadap fluktuasi kebijakan moneter Amerika Serikat, khususnya perubahan suku bunga dan kebijakan likuiditas global. Ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga, arus modal global cenderung kembali ke Amerika Serikat, menyebabkan depresiasi mata uang negara berkembang, peningkatan beban utang luar negeri, serta tekanan terhadap neraca pembayaran (Chinn & Frankel, 2023).

Dalam konteks ini, dedolarisasi BRICS berpotensi menjadi instrumen mitigasi risiko struktural bagi negara berkembang. Penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral dan regional dapat mengurangi eksposur terhadap volatilitas dolar, sekaligus menurunkan biaya transaksi dan kebutuhan lindung nilai (hedging). Selain itu, diversifikasi cadangan devisa ke mata uang non-dolar dan aset riil seperti emas memberikan fleksibilitas lebih besar bagi bank sentral dalam menjaga stabilitas makroekonomi (BIS, 2023). Namun demikian, dedolarisasi juga menghadirkan tantangan baru. Tidak semua mata uang BRICS memiliki tingkat stabilitas, likuiditas, dan kepercayaan global yang setara dengan dolar. Perbedaan tingkat inflasi, kapasitas pasar keuangan, serta kredibilitas kebijakan moneter antar-negara BRICS berpotensi menciptakan ketidakseimbangan baru dalam sistem moneter multipolar. Oleh karena itu, keberhasilan dedolarisasi sangat bergantung pada koordinasi kebijakan moneter, penguatan institusi keuangan, dan konsistensi komitmen politik antar-anggota BRICS.

G. Evaluasi Kritis Kelembagaan BRICS dalam Tata Kelola Keuangan Global

Meskipun BRICS telah membentuk lembaga keuangan alternatif seperti New Development Bank dan Contingent Reserve Arrangement, efektivitas kelembagaan ini masih menjadi perdebatan dalam literatur akademik. Di satu sisi, NDB dipandang sebagai terobosan penting dalam pembiayaan pembangunan yang lebih adil dan tidak terlalu terikat pada syarat-syarat neoliberal. Pendekatan ini memberi ruang kebijakan yang lebih luas bagi negara berkembang untuk menentukan prioritas pembangunan nasional tanpa tekanan reformasi struktural yang sering kali berdampak sosial negatif (Stuenkel, 2022).

Di sisi lain, skala pembiayaan NDB masih relatif kecil jika dibandingkan dengan Bank Dunia atau IMF. Total pembiayaan sebesar USD 33 miliar hingga 2023 menunjukkan kemajuan, tetapi belum cukup untuk secara signifikan menggantikan peran lembaga Bretton Woods dalam stabilisasi dan pembangunan global (NDB, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa BRICS masih berada pada tahap transisi dalam membangun kapasitas kelembagaan yang mampu menopang sistem keuangan global alternatif secara penuh.

CRA juga menghadapi tantangan serupa. Meskipun dirancang sebagai mekanisme penyangga likuiditas, pemanfaatannya masih terbatas dan belum diuji secara luas dalam krisis keuangan berskala besar. Dengan demikian, rekonstruksi sistem moneter internasional oleh BRICS bersifat evolusioner, bukan revolusioner, dan memerlukan waktu serta konsistensi kebijakan jangka panjang.

H. Digitalisasi Keuangan dan Masa Depan Arsitektur Moneter BRICS

Digitalisasi keuangan menjadi faktor kunci yang dapat mempercepat transformasi sistem moneter internasional. BRICS memanfaatkan kemajuan teknologi finansial melalui pengembangan sistem pembayaran alternatif seperti CIPS dan BRICS Pay. Sistem ini tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap SWIFT, tetapi juga mempercepat transaksi lintas negara dan meningkatkan efisiensi biaya pembayaran internasional (Prasad, 2021).

Dalam jangka panjang, digitalisasi membuka peluang bagi BRICS untuk mengembangkan mata uang digital bank sentral (central bank digital currency / CBDC) yang terintegrasi lintas negara. Implementasi CBDC lintas-BRICS berpotensi memperkuat dedolarisasi sekaligus meningkatkan transparansi dan pengawasan transaksi keuangan internasional. Namun, tantangan terkait keamanan siber, perlindungan data, serta harmonisasi regulasi tetap menjadi isu krusial yang perlu diatasi.

Digitalisasi juga berimplikasi terhadap tata kelola keuangan global. Sistem pembayaran berbasis teknologi memungkinkan munculnya arsitektur keuangan yang lebih terdesentralisasi, di mana peran negara hegemon semakin berkurang. Dalam konteks ini, BRICS memiliki peluang strategis untuk menjadi

pelopor transformasi sistem moneter berbasis teknologi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan negara berkembang.

I. Implikasi Transformasi BRICS terhadap Pengembangan Keuangan Syariah Global

Transformasi arsitektur keuangan global yang dipelopori oleh BRICS memiliki implikasi langsung terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global. Prinsip dasar keuangan syariah seperti pembiayaan berbasis aset riil, pembagian risiko, dan larangan spekulasi berlebihan menjadi semakin relevan dalam konteks ketidakstabilan sistem keuangan global berbasis utang.

Multipolaritas keuangan membuka ruang bagi negara-negara dengan sistem keuangan syariah untuk berperan lebih aktif dalam pembentukan standar dan instrumen keuangan global. Negara-negara BRICS+ yang memiliki basis ekonomi Islam yang kuat, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dapat mendorong integrasi instrumen syariah ke dalam pembiayaan pembangunan multilateral, termasuk melalui penerbitan sukuk oleh New Development Bank (Ismal, 2022).

Selain itu, perdagangan berbasis mata uang lokal dan pengurangan dominasi dolar berpotensi mengurangi unsur spekulatif dalam transaksi valuta asing, yang selama ini menjadi salah satu kritik utama dalam perspektif syariah. Dengan demikian, transformasi arsitektur keuangan global oleh BRICS tidak hanya berdampak struktural, tetapi juga normatif, yaitu membuka jalan bagi sistem keuangan global yang lebih etis, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

J. Sintesis Temuan dan Arah Transformasi Jangka Panjang

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disintesis bahwa peran BRICS dalam transformasi arsitektur keuangan global bersifat strategis namun bertahap. BRICS tidak secara langsung menggantikan sistem moneter yang ada, tetapi secara perlahan membangun alternatif melalui dedolarisasi, penguatan institusi keuangan, digitalisasi pembayaran, dan perluasan kerja sama ekonomi Selatan-Selatan.

Transformasi ini mencerminkan perubahan paradigma dalam tata kelola keuangan global, dari sistem yang terpusat dan hegemonik menuju struktur yang lebih plural dan adaptif. Dalam jangka panjang, keberhasilan BRICS akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menjaga kohesi internal, memperkuat institusi keuangan, serta mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan termasuk prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam arsitektur keuangan global yang baru.

Kesimpulan

Transformasi arsitektur keuangan global yang dipelopori oleh BRICS menunjukkan pergeseran penting dari sistem moneter internasional yang bersifat unipolar menuju struktur yang lebih multipolar dan inklusif. Melalui strategi dedolarisasi, penguatan kerja sama moneter, pembentukan institusi keuangan alternatif seperti New Development Bank dan Contingent Reserve Arrangement, serta pemanfaatan digitalisasi sistem pembayaran, BRICS berupaya mengurangi ketergantungan negara berkembang terhadap dominasi dolar Amerika Serikat dan lembaga keuangan Bretton Woods. Meskipun transformasi ini masih bersifat bertahap dan menghadapi keterbatasan kelembagaan, peran BRICS secara nyata telah memperluas ruang kebijakan moneter dan keuangan bagi negara-negara Global South dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi global.

Dari perspektif ekonomi dan keuangan syariah, transformasi yang dilakukan BRICS memiliki relevansi normatif dan struktural yang signifikan. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keseimbangan, pembagian risiko, dan keterkaitan dengan sektor riil sejalan dengan upaya BRICS dalam membangun sistem keuangan global yang lebih stabil dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Multipolaritas keuangan membuka peluang bagi integrasi instrumen keuangan syariah, termasuk sukuk dan pembiayaan berbasis aset, dalam arsitektur keuangan global yang baru. Dengan demikian, kebangkitan BRICS tidak hanya merepresentasikan perubahan kekuatan ekonomi global, tetapi juga menyediakan momentum strategis bagi pengembangan sistem keuangan internasional yang lebih etis, berkelanjutan, dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S., Akinci, O., & Queraltó, A. (2024). U.S. monetary spillovers to emerging markets. *International Finance Discussion Papers*. Board of Governors of the Federal Reserve System.
- Arslanalp, S., Eichengreen, B., & Simpson-Bell, C. (2022). The stealth erosion of dollar dominance and the rise of nontraditional reserve currencies. *Journal of International Economics*, 138, 103656. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2022.103656>
- Askari, H., Iqbal, Z., Krichene, N., & Mirakhor, A. (2012). *Risk sharing in finance: The Islamic finance alternative*. John Wiley & Sons.
- Bank for International Settlements. (2024). *Annual economic report 2024*. BIS.
- Bank for International Settlements Innovation Hub. (2024). *Project mBridge reached minimum viable product stage*. BIS.
- BRICS. (2024). *XVI BRICS Summit Kazan Declaration*. BRICS.
- BRICS. (2025). *Rio de Janeiro Declaration: Strengthening Global South cooperation for a more inclusive and sustainable governance*. BRICS.

- Brazil Ministry of Foreign Affairs. (2025). Indonesia as a new member of BRICS. Government of Brazil.
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah. Islamic Research and Training Institute.
- Chinn, M. D., & Frankel, J. A. (2023). Will the dollar continue to dominate the international monetary system? *Journal of International Money and Finance*, 132, 102800. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2022.102800>
- Eichengreen, B., Mehl, A., & Chitu, L. (2018). How global currencies work: Past, present, and future. Princeton University Press.
- Farhi, E., & Maggiori, M. (2018). A model of the international monetary system. *The Quarterly Journal of Economics*, 133(1), 295-355. <https://doi.org/10.1093/qje/qjx031>
- Financial Stability Board. (2024). G20 roadmap for enhancing cross-border payments: Consolidated progress report for 2024. FSB.
- Gallagher, K. P., & Kozul-Wright, R. (2022). The case for a new Bretton Woods. Polity Press.
- International Monetary Fund. (2025). Currency composition of official foreign exchange reserves (COFER). IMF Data.
- International Monetary Fund. (2025). External sector report 2025: International monetary system – currencies in a changing world. IMF.
- International Islamic Financial Market. (2025). IIFM Sukuk report 2025: A comprehensive study of the global sukuk market. IIFM.
- Islamic Financial Services Board. (2025). Islamic financial services industry stability report 2025. IFSB.
- Islamic Financial Services Board, Islamic Research and Training Institute, & Islamic Development Bank. (2010). Islamic finance and global financial stability. IFSB, IRTI, and IDB.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An introduction to Islamic finance: Theory and practice (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- LSEG & Islamic Corporation for the Development of the Private Sector. (2025). Islamic finance development report 2025. LSEG and ICD.
- New Development Bank. (2022). General strategy for 2022-2026: Scaling up development finance for a sustainable future. NDB.
- New Development Bank. (2024). Annual report 2024. NDB.
- Prasad, E. (2021). The future of money: How the digital revolution is transforming currencies and finance. Harvard University Press.
- Stuenkel, O. (2022). The BRICS and the future of global order (2nd ed.). Lexington Books.
- Subacchi, P. (2020). The cost of free money: How unfettered capital threatens our economic future. Yale University Press.